

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA CILEGON**

JURNAL



Oleh:

Nama : Anatoly Aditya Saputra
Nomor Mahasiswa : 14313134
Program Studi : Ilmu Ekonomi

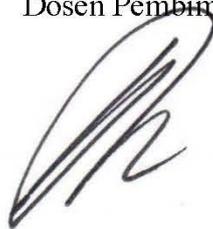
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA CILEGON

Nama : Anatoly Aditya Saputra
Nomor Mahasiswa : 14313134
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Maret 2018
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Suharto S.E., M.Si.

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA CILEGON

Anatoly Aditya Saputra

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Surel : anatolyaditya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016 dengan menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industry terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (time series) tahun 2001 – 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Cilegon dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon. Pada penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian secara statistic meliputi uji T, uji F, dan uji determinasi (R^2) pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Hasil analisis data dengan regresi log linier berganda diperoleh bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon. Hasil Uji ekonometrika tidak menunjukkan adanya gangguan multikolinearitas, gangguan heteroskedastisitas, dan gangguan autokorelasi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri.

PENDAHULUAN

Indonesia guna mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah melaksanakan reformasi dengan menetapkan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah, memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam pembangunan nasional dan daerah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Semakin besar penanaman PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting lain dalam PAD.

Kota Cilegon yang berdiri pada tanggal 27 April 1999 merupakan salah satu kota di Propinsi Banten yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan

mengelola sumber pendapatannya sendiri. Dikenal dengan Kota Industri menjadikan Kota Cilegon, kota terbesar ke-4 di Provinsi Banten sebagai kota penyumbang PAD besar bagi provinsi Banten. Potensi perekonomian Kota Cilegon berasal dari Perdagangan, Perhotelan dan Restoran, dan Industri. Beberapa industri yang ada di Cilegon diantaranya Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, dan Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Sektor lain yang dimiliki oleh Kota Cilegon adalah sektor pelabuhan seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading Habeam Center.

Tabel 1

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Besar Kontribusi (%)
2006	112.242.273.817	77.001.182.988	68,60
2007	92.802.293.870	73.410.440.255	79,10
2008	129.831.026.861	79.545.273.663	61,27
2009	135.537.939.538	82.328.146.411	60,74
2010	150.249.201.605	84.928.180.856	56,52
2011	253.212.004.831	172.965.160.026	68,31
2012	331.861.814.250	147.686.642.561	44,50
2013	291.943.585.049	177.144.972.228	60,68
2014	467.945.449.677	340.323.435.803	72,73
2015	579.585.574.661	412.600.922.492	71,19
2016	567.453.107.619	392.549.543.855	69,18

Sumber : DPPKD Kota Cilegon

Dari tabel 1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah Kota Cilegon dari tahun 2006 sampai dengan 2016 terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari PAD hal ini dapat dilihat dari besar kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap PAD. PAD tertinggi pada sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2016 yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 467.945.449.677 yang kemudian diikuti dengan pajak daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 340.323.435.803 yang merupakan pajak daerah tertinggi sepanjang tahun 2006

sampai dengan 2016 dengan besar kontribusi sebesar 72,73% namun mengalami penurunan dua tahun kedepan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.

KAJIAN PUSTAKA

Haniz (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010. Metode yang dilakukan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diantaranya adalah data penerimaan pajak daerah, wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

Nastiti (2015) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun dari tahun 1993 sampai dengan 2014. Analisis yang digunakan untuk pengaruh PDRB, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Kabupaten Madiun digunakan model regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa variabel PRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya oleh Arianto (2014) penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis menunjukkan bahwa

jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya, sedangkan inflasi menunjukkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa pajak daerah dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹ Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya

¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 2 jenis pendapatan pajak yaitu: pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota (Halim, 2012). Jenis Pajak Provinsi Terdiri Dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Pajak kendaraan di air; c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; d. Bea balik nama kendaraan di air; e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; f. Pajak Air Permukaan; dan g. Pajak Rokok. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan; f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C; g. Pajak lingkungan; h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; i. Pajak Parkir; j. Pajak Sarang Burung Walet; k. Pajak Bumi dan Bangunan; dan l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kewenangan pada kegiatan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS (2017) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi residen maupun non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang lainnya seperti makanan, minuman, rokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, rekreasi, transportasi, olahraga, komunikasi, dan jasa keuangan.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (*secular stagnation*) yang menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan pihak Pengelola Perpajakan Kota Cilegon. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* pada periode 2001 – 2016. Data yang diteliti meliputi : **(1) Pajak Daerah** dalam rupiah, **(2) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)** dalam triliun rupiah, **(3) Jumlah Penduduk, dan (4) Inflasi** dalam persen. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

dimana :

Y_t adalah Pajak Daerah Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{1it} adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{2it} adalah Jumlah Penduduk Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{3it} adalah Inflasi Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{4it} adalah Jumlah Industri Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

Pada penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian uji MacKinnon, White, dan Davidson (MWD). secara statistik meliputi uji T, uji F, dan uji determinasi (R^2) pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan

inflasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.

Tabel 2

Hasil Uji MWD Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Z1	-7.84E+10	7.91E+10	-0.991090	0.3450
R-squared	0.897383			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Tabel 3

Hasil Uji MWD Log Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Z2	3.67E-12	4.30E-12	0.853709	0.4132
R-squared	0.954606			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Hasil Uji MWD

Berdasarkan hasil uji MWD, dilihat dari variabel Z1 yang menunjukkan hasil nilai 0.3450 dimana lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan tidak signifikan atau gagal menolak hipotesis nol dan Z2 yang menunjukkan hasil nilai 0.4132 dimana lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan tidak signifikan atau menerima hipotesis alternatif. Maka keputusan yang tepat untuk menggunakan model pada penelitian ini yaitu model linier dan log linier sama baiknya atau layak digunakan. Jika model linier dan log linier layak digunakan maka dapat dilihat nilai determinasi *R – square* (R^2) yang lebih tinggi, maka model yang dapat digunakan adalah log linier.

Tabel 4**Hasil Uji Log Linier**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.272.195	1.981.085	-2.156.492	0.0540
LOG(X1)	0.377877	0.184972	2.042.894	0.0658
LOG(X2)	5.477.238	1.607.732	3.406.811	0.0059
X3	-0.001270	0.018562	-0.068429	0.9467
LOG(X4)	-0.710406	0.639508	-1.110.863	0.2903
R-squared	0.950353			
Adjusted R-squared	0.932300			
F-statistic	5.264.124			
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Hasil regresi log linier berganda yang didapat adalah :

$$\text{Log(Pajak Daerah)} = -42.72195 + 0.414276 \text{ Log(PDRB)} + 5.085388 \text{ Log(Jumlah Penduduk)} - 0.062361 \text{ Inflasi} - 0.718148 \text{ Log(Jumlah Industri)}$$

Terlihat koefisien $\beta_0 = -42.72195$ yang mengandung arti apabila PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri sebesar 0 maka Pajak Daerah sebesar -42.72195 persen. $\beta_1 = 0.414276$ yang mengandung arti setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan diikuti peningkatan penerimaan Pajak Daerah sebesar 0.414276% dengan asumsi Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Industri tetap, maka PDRB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. $\beta_2 = 5.085388$ yang mengandung arti setiap peningkatan Jumlah Penduduk sebesar 1% akan diikuti peningkatan penerimaan Pajak Daerah sebesar 5.085388% dengan asumsi PDRB, Inflasi, dan Jumlah Industri tetap, maka Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. $\beta_3 = -0.062361$ yang mengandung arti setiap peningkatan Inflasi sebesar 1% akan diikuti penurunan Pajak Daerah sebesar 0.062361% dengan asumsi PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri tetap, maka Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. $\beta_4 = -0.718148$

yang mengandung arti setiap peningkatan Jumlah Industri sebesar 1% akan diikuti penurunan Pajak Daerah sebesar 0.718148% dengan asumsi PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi tetap, maka Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.

Uji Statistik :

Uji T

Pada Uji T didapatkan hasil :

- Variabel PDRB (X1) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.0658 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ maka menolak H_0 , karena nilai probabilitas lebih kecil dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$.
- Variabel Jumlah Penduduk (X2) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.0059 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% maka menolak H_0 , karena nilai probabilitas lebih kecil dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.
- Variabel inflasi (X3) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.9467 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% maka gagal menolak H_0 , karena nilai probabilitas lebih besar dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pajak Daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% .
- Variabel Jumlah Industri (X4) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.2903 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% maka gagal menolak H_0 , karena nilai probabilitas lebih besar dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen Jumlah

Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% .

Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Uji ini membandingkan F hitung dengan F tabel, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak, dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap nilai variabel dependen. Diketahui F tabel dengan mencari berdasarkan numerator dan denominator maka dihasilkan F tabel sebesar 3,36 dan hasil regresi log linier menunjukkan F hitung sebesar 53.71518 maka F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian variansi variabel independen (PDRB ADHK, Jumlah Penduduk, Inflasi, Jumlah Industri) secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen (Pajak Daerah), maka model layak untuk digunakan.

Analisis Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang ditunjukkan dengan besarnya *R – square* (R^2). Semakin tinggi nilai *R – square* (R^2) hal tersebut mempunyai arti bahwa model regresi yang digunakan semakin baik, karena sebagian besar variansi dari variabel bebas dapat menjelaskan variansi dari variabel terikat. Nilai determinasi *R – square* (R^2) menunjukkan 0.951297 (95,12%) yang berarti bahwa variasi variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri) dapat mampu menjelaskan variabel dependennya melalui model ini sebesar 95,12% sisanya yaitu 4,88% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	Jumlah Penduduk	Inflasi	Jumlah Industri
PDRB	1	0,850252	-0,226323	0,613576
Jumlah Penduduk	0,850252	1	-0,487346	0,668354
Inflasi	-0,226323	-0,487346	1	-0,20099
Jumlah Industri	0,613576	0,668354	-0,20099	1

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan r^2 dengan R^2 .

Berikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	r^2	R^2	Kesimpulan
PDRB - Jumlah Penduduk	0,850252	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Inflasi	-0,226323	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Industri	0,613576	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Inflasi	-0,487346	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Jumlah Industri	0,668354	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Inflasi - Jumlah Industri	-0,20099	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Penduduk	0,850252	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Inflasi	-0,226323	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Industri	0,613576	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Inflasi	-0,487346	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.308.866	Prob. F(4,11)	0.3259
Obs*R-squared	5.159.534	Prob. Chi-Square(4)	0.2713
Scaled explained SS	2.350.379	Prob. Chi-Square(4)	0.6716

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Uji Heteroskedastisitas Glejser

Tabel 8

Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

F-statistic	2.372.316	Prob. F(4,11)	0.1159
Obs*R-squared	7.410.136	Prob. Chi-Square(4)	0.1157
Scaled explained SS	4.602.352	Prob. Chi-Square(4)	0.3306

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas F hitung 0.2713 dan uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas F hitung 0.1157 yang dimana dari kedua uji heteroskedastisitas menunjukkan lebih besar dari signifikansi $\alpha = 5\%$. Dengan ini menjelaskan variabel independen lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 9

Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.343642	Prob. F(2,9)	0.7181
Obs*R-squared	1.135.154	Prob. Chi-Square(2)	0.5669

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Nilai probabilitas F atau probabilitas F hitung menunjukkan nilai 0.5669. Maka Nilai Probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga berdasarkan uji hipotesis gagal menolak H_0 artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.

INTERPRETASI HASIL PENGOLAHAN DATA

Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis. Besar koefisien variabel PDRB sebesar 0.377877, yang menjelaskan bahwa apabila PDRB naik 1 persen, maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0.377877 persen dengan asumsi variabel selain PDRB tetap atau konstan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan semakin tinggi. Bila pertumbuhan daerah tinggi maka pendapatan masyarakat akan ikut meningkat dan kesejahteraan akan ikut meningkat. Dengan naiknya pendapatan maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Hal ini berdampak dengan penerimaan pajak yang akan ikut meningkat, karena kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel PDRB secara positif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dari penelitian ini nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Jumlah Penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk akan disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebagai bagian dari subjek yang mendorong dalam

penerimaan pajak yang dimana membayarkan sebagian penghasilannya untuk pemungutan pajak.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel sebesar 0.9480 yang dimana lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% . Hal ini dijelaskan bahwa tidak semua penduduk Kota Surakarta terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak.

Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah

Inflasi Kota Cilegon berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berhubungan negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurrohman (2010) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. Dari penelitian ini nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0,8375 dimana lebih besar dari signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga hal ini menyebabkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. Ketika harga barang naik atau turun, tidak mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pekerja yang hanya mendapatkan penghasilan tetap. Namun bagi pekerja yang memiliki penghasilan yang tinggi, dampak inflasi tidak begitu berpengaruh karena berapapun tinggi harga suatu barang maka akan tetap dibeli karena sifat konsumtif manusia. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan

penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan juga akan relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan kenaikan inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah

Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dilihat dari banyaknya jumlah industri yang tercatat dalam BPS yang terlihat tidak stabil dan cenderung turun semisal pada tahun 2014 sebanyak 81 industri menurun menjadi 79 industri di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan menurut BPS Banten, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) yang terjadi di Banten sempat melonjak ke angka 10,97% pada kuartal I/2013 year-on-year (yoy), kemudian berangsur menyusut hingga -4,26% pada kuartal I/2014, dan kembali naik tipis 2,59% pada kuartal I/2015 lalu menurun ke angka -0,96% (yoy), atau berkebalikan dengan kenaikan IBS secara nasional yang naik 4,08% pada kuartal I/2016.

Penurunan ini banyak disebabkan oleh industri makanan yang menyumbang penurunan sebesar 9,85% (yoy) dan juga industri tekstil sebesar 2,55% di daerah Banten yang juga berdampak ke Kota Cilegon, serta Kota Cilegon lebih banyak bergantung dengan industri pengolahan yang dominan berorientasi pada ekspor impor belum dapat menunjukkan hasil yang positif dikarenakan masih bergantungnya dengan bahan baku impor dan sebagainya sehingga membuat beberapa perusahaan yang tidak bertahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.

IMPLIKASI

Bagi pemerintah daerah Kota Cilegon diharapkan dapat memperhatikan PDRB karena menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, maka penulis menyarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan PDRB. Maka dengan penambahan PDRB akan diikuti pula penambahan penerimaan pajak daerah. Serta memperhatikan laju inflasi yang terjadi sehingga dapat menekean laju inflasi sehingga diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak daerah.

Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tahun rentang tahun dan variabel – variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk. (2012), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arianto, P. S. (2014), “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 3. p. 1-16.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, Cilegon Dalam Angka Tahun 2000 sampai dengan 2017.
- Boediono. (1999), Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Devas, Nick (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Ghozali, I. (2005), Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan SPSS. In I. Ghozali. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. (2004), Manajemen Keuangan Daerah Edisi Refisi. In A. Halim, UPP: AMD YKPN, Yogyakarta.
- Haniz, N. F. (2013), “Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”, Diponegoro Journal of Economics, Vol.3. p. 1-13.
- Hariyuda, R. (2009), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri), Skripsi Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- James McMaster (1994), Urban Financial Management, The World Bank, Washington D.C.
- Kaho, Josef Riwu (2001), Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K.J Davey (1998), Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga diterjemahkan oleh Amanullah, UI Press, Jakarta.
- Mardiasmo (2004), Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua), Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____ (1999). Perpajakan Edisi ke-7, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad (2004), Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Mudrajad, Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Nastiti, C. R. (2015), Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4, 1-19.

Nopirin (2010), Ekonomi Moneter (4 ed.), BPFE. Yogyakarta.

Nurmayasari, Dini (2010), “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Nurrohman, Alfian (2010), “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)”, Skripsi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Rahdina, D.P. (2008), “Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah”, Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Randria, Febby (2016), “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01.

Riduansyah, Mohammad (2003), “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2.

Ruswandi, Rina Rahwmawati (2009), “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Tahwin, M. (2013), “Identifikasi Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18. p. 1-8.

- Tamara, Ashad Darulmaslshah (2009), “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1998-2008)”, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2 November, Hal. 151-172.
- Tarigan, Robinson M.R.P. (2005), Ekonomi Regional Teori & Aplikasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Tata Cara dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia 2016.
- Wantara, A. (1997), “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat DIY (1970 - 1992)”, Kinerja - Jurnal Bisnis dan Ekonomi, No. 2.
- Widarjono, Agus (2014), Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ke-4, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.